



BUPATI TANA TIDUNG

KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG

NOMOR : 810/2256/2019

**TENTANG
KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu menambah pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;
- b. Bahwa untuk penambahan pegawai Aparatur Sipil Negara dimaksud dipandang perlu menetapkan kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 Nomor 4);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 Tanggal 8 Juli 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2017 Tanggal 4 Desember 2017 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1739);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 Tanggal 30 Oktober 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 835 Tahun 2019 Tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1069/M.SM.01.00/2019 Tanggal 28 Oktober 2019 perihal Informasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 Di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Bupati Tana Tidung tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Penetapan Rincian Kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sejumlah 194 (seratus Sembilan puluh empat) dengan rincian Formasi Jabatan Tenaga Guru sebanyak 29 (dua puluh sembilan), Tenaga Kesehatan sebanyak 32 (tiga puluh dua), dan Tenaga Teknis sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil tersebut dilakukan sesuai dengan Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tideng Pale
Pada Tanggal 05 November 2019



BUPATI,

H. UNDUNSYAH

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional VIII BKN di Banjarbaru;
6. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
7. Inspektur Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale.

Lampiran1 Keputusan Bupati Tana Tidung
 Nomor : 810/2256/2019
 Tanggal 05 November 2019

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
 TAHUN ANGGARAN 2019

(Berdasarkan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 835 Tahun 2019 dan Surat Menteri PAN-RB Nomor B/1069/M.SM.01.00/2019)

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	CUMLAUDE	DISABILITAS	FORMASI UMUM	UNIT KERJA PENEMPATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	JUMLAH		194	1	4	189		
A.	FORMASI UMUM		194	1	4	189		
A.1.	TENAGA PENDIDIKAN		29	0	4	25		
1	GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA	S-1/D-IV PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	11	0	1	0	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SEKOLAH SD NEGERI 020 TANA TIDUNG, GURU AGAMA ISLAM	
				0	1	0	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SEKOLAH SD NEGERI 005 TANA TIDUNG, GURU AGAMA ISLAM	
				0	0	1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SEKOLAH SD NEGERI 018 TANA TIDUNG, GURU AGAMA ISLAM	
				0	0	1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SEKOLAH SD NEGERI 021 TANA TIDUNG, GURU AGAMA ISLAM	
				0	0	1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SEKOLAH SD NEGERI 012 TANA TIDUNG, GURU AGAMA ISLAM	
				0	0	1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SEKOLAH SD NEGERI 014 TANA TIDUNG, GURU AGAMA ISLAM	
				0	0	1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SEKOLAH SD NEGERI 016 TANA TIDUNG, GURU AGAMA ISLAM	
				0	0	1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SEKOLAH SD NEGERI 024 TANA TIDUNG, GURU AGAMA ISLAM	
				0	0	1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SEKOLAH SD NEGERI 019 TANA TIDUNG, GURU AGAMA ISLAM	
				0	0	1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SEKOLAH SD NEGERI 011 TANA TIDUNG GURU AGAMA ISLAM	
				0	0	1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SEKOLAH SD NEGERI 025 TANA TIDUNG, GURU AGAMA ISLAM	

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	CUMLAUDE	DISABILITAS	FORMASI UMUM	UNIT KERJA PENEMPATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	GURU BAHASA INDONESIA AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA / D-IV PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA	5	0	1	0	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 3 TANA TIDUNG, GURU BAHASA INDONESIA	
				0	1	0	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 5 TANA TIDUNG, GURU BAHASA INDONESIA	
				0	0	1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 2 TANA TIDUNG, GURU BAHASA INDONESIA	
				0	0	1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 4 TANA TIDUNG, GURU BAHASA INDONESIA	
				0	0	1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 6 TANA TIDUNG, GURU BAHASA INDONESIA	
3	GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA	4	0	0	1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 3 TANA TIDUNG, GURU MATEMATIKA	
				0	0	1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 4 TANA TIDUNG, GURU MATEMATIKA	
				0	0	1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 2 TANA TIDUNG, GURU MATEMATIKA	
				0	0	1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 5 TANA TIDUNG, GURU MATEMATIKA	
4	GURU PENJASORKES AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN JASMANI DAN OLAHRAGA/D-IV PENDIDIKAN JASMANI/ OLAHRAGA KESEHATAN/ S-1 PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN/ S-1 PENDIDIKAN JASMANI	8	0	0	1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SEKOLAH SD NEGERI 002 TANA TIDUNG, GURU PENJASORKES	
				0	0	1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SEKOLAH SD NEGERI 018 TANA TIDUNG, GURU PENJASORKES	
				0	0	1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SEKOLAH SD NEGERI 007 TANA TIDUNG, GURU PENJASORKES	
				0	0	1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SEKOLAH SD NEGERI 016 TANA TIDUNG, GURU PENJASORKES	
				0	0	1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SEKOLAH SD NEGERI 024 TANA TIDUNG, GURU PENJASORKES	

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	CUMLAUDE	DISABILITAS	FORMASI UMUM	UNIT KERJA PENEMPATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				0	0	1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SEKOLAH SD NEGERI 019 TANA TIDUNG, GURU PENJASORKES	
				0	0	1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SEKOLAH SD NEGERI 010 TANA TIDUNG, GURU PENJASORKES	
				0	0	1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SEKOLAH SD NEGERI 020 TANA TIDUNG, GURU PENJASORKES	
5	GURU TAMAN KANAK-KANAK AHLI PERTAMA	S-1 PGTK		0	0	1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SEKOLAH TK NEGERI PEMBINA, GURU TAMAN KANAK-KANAK	
A.2.	TENAGA KESEHATAN		32					
1.	APOTEKER AHLI PERTAMA	APOTEKER	1	0	0	1	KEPALA DINAS KESEHATAN, DIREKTUR RSUD AKHMAD BERAHIM (TIPE C), APOTEKER	
2.	DOKTER AHLI PERTAMA	DOKTER UMUM	3	0	0	3	KEPALA DINAS KESEHATAN, DIREKTUR RSUD AKHMAD BERAHIM (TIPE C), DOKTER	
3.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA	DOKTER GIGI	3	0	0	3	KEPALA DINAS KESEHATAN, DIREKTUR RSUD AKHMAD BERAHIM (TIPE C), DOKTER GIGI	
4.	DOKTER SPESIALIS ANAK AHLI PERTAMA	DOKTER SPESIALIS ANAK	1	0	0	1	KEPALA DINAS KESEHATAN, DIREKTUR RSUD AKHMAD BERAHIM (TIPE C), DOKTER SPESIALIS ANAK	
5.	DOKTER SPESIALIS BEDAH AHLI PERTAMA	DOKTER SPESIALIS BEDAH	1	0	0	1	KEPALA DINAS KESEHATAN, DIREKTUR RSUD AKHMAD BERAHIM (TIPE C), DOKTER SPESIALIS BEDAH	
6.	DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN AHLI PERTAMA	DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN	1	0	0	1	KEPALA DINAS KESEHATAN, DIREKTUR RSUD AKHMAD BERAHIM (TIPE C), DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN	
7.	DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM AHLI PERTAMA	DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	0	0	1	KEPALA DINAS KESEHATAN, DIREKTUR RSUD AKHMAD BERAHIM (TIPE C), DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	
8.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	S-1 EPIDEMIOLOGI / S-1 KESMAS EPIDEMIOLOGI / D-IV EPIDEMIOLOGI	1	0	0	1	KEPALA DINAS KESEHATAN, DIREKTUR RSUD AKHMAD BERAHIM (TIPE C), EPIDEMIOLOG KESEHATAN	
9.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	S-1 GIZI	1	0	0	1	KEPALA DINAS KESEHATAN, DIREKTUR RSUD AKHMAD BERAHIM (TIPE C), NUTRISIONIS	
10.	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / D-IV KESEHATAN MASYARAKAT	1	0	0	1	KEPALA DINAS KESEHATAN, DIREKTUR RSUD AKHMAD BERAHIM (TIPE C), PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	
11.	PERAWAT AHLI PERTAMA	NERS	1	0	0	1	KEPALA DINAS KESEHATAN, DIREKTUR RSUD AKHMAD BERAHIM (TIPE C), PERAWAT	

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	CUMLAUDE	DISABILITAS	FORMASI UMUM	UNIT KERJA PENEMPATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	ASISTEN APOTEKER PELAKSANA/TERAMPIL	D-III FARMASI	1	0	0	1	KEPALA DINAS KESEHATAN, DIREKTUR RSUD AKHMAD BERAHIM (TIPE C), ASISTEN APOTEKER	
13.	BIDAN PELAKSANA/TERAMPIL	D-III KEBIDANAN	4	0	0	1	KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPALA UPT PUSKESMAS KUJAU, BIDAN	
				0	0	3	KEPALA DINAS KESEHATAN, DIREKTUR RSUD AKHMAD BERAHIM (TIPE C), BIDAN	
14.	FISIOTERAPIS PELAKSANA/TERAMPIL	D-III FISIOTERAPI	1	0	0	1	KEPALA DINAS KESEHATAN, DIREKTUR RSUD AKHMAD BERAHIM (TIPE C), FISIOTERAPIS	
15.	NUTRISIONIS PELAKSANA/TERAMPIL	D-III GIZI / D-III GIZI (NUTRISIONIS)	1	0	0	1	KEPALA DINAS KESEHATAN, DIREKTUR RSUD AKHMAD BERAHIM (TIPE C), NUTRISIONIS	
16.	PERAWAT PELAKSANA/TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN	4	0	0	1	KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPALA UPT PUSKESMAS KUJAU, PERAWAT	
				0	0	3	KEPALA DINAS KESEHATAN, DIREKTUR RSUD AKHMAD BERAHIM (TIPE C), PERAWAT	
17.	PERAWAT GIGI PELAKSANA/TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN GIGI	1	0	0	1	KEPALA DINAS KESEHATAN, DIREKTUR RSUD AKHMAD BERAHIM (TIPE C), PERAWAT GIGI	
18.	PEREKAM MEDIS PELAKSANA/TERAMPIL	D-III REKAM MEDIS	1	0	0	1	KEPALA DINAS KESEHATAN, DIREKTUR RSUD AKHMAD BERAHIM (TIPE C),PEREKAM MEDIS	
19.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA/TERAMPIL	D-III ANALIS KESEHATAN	2	0	0	2	KEPALA DINAS KESEHATAN, DIREKTUR RSUD AKHMAD BERAHIM (TIPE C), PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	
20.	SANITARIAN PELAKSANA/TERAMPIL	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN	1	0	0	1	KEPALA DINAS KESEHATAN, DIREKTUR RSUD AKHMAD BERAHIM (TIPE C), SANITARIAN	
21.	TEKNISI ELEKTROMEDIS PELAKSANA / TERAMPIL	D-III ELEKTROMEDIK	1	0	0	1	KEPALA DINAS KESEHATAN, DIREKTUR RSUD AKHMAD BERAHIM (TIPE C), TEKNISI ELEKTROMEDIS	
A.3.	TENAGA TEKNIS		133					
1.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA/ S-1 PEMERINTAHAN	1	0	0	1	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, KABID PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PAMANFAATAN DATA, KASIE PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, ANALIS KEBIJAKAN	
2.	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU HUKUM / S-1 TEKNIK SIPIL	2	0	0	1	INSPEKTUR, INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I, AUDITOR	
				0	0	1	INSPEKTUR, INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II, AUDITOR	

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	CUMLAUDE	DISABILITAS	FORMASI UMUM	UNIT KERJA PENEMPATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI	1	0	0	1	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN PEMBANGUNAN, KABAG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, KASUBBAG PENGADAAN DAN JASA, PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	
4.	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 PERTANIAN / D-IV PERTANIAN	2	0	0	2	KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN, KABID KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUH, KASI PENYULUH, PENYULUH PERTANIAN	
5.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1	0	0	1	SEKRETARIS DEWAN, KEPALA BAGIAN FASILITAS PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN, KASUBBAG FASILITAS PENGAWASAN, PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
6.	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	S-1 PERPUSTAKAAN / D-IV PERPUSTAKAAN	2	0	0	1	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN PEMBANGUNAN, KABAG ORGANISASI DAN TATA LAKSANA, KASUBBAG PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN, PUSTAKAWAN	
				0	0	1	SEKRETARIS DEWAN, KEPALA BAGIAN FASILITAS PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN, KASUBBAG FASILITAS PENGAWASAN, PUSTAKAWAN	
7.	ARSIPARIS PELAKSANA/TERAMPIL	D-III KEARSIPAN / D-III PERKANTORAN / D-III SEKRETARIS	1	0	0	1	SEKRETARIS DEWAN, KEPALA BAGIAN FASILITAS PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN, KASUBBAG FASILITAS PENGAWASAN, ARSIPARIS	
8.	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PELAKSANA/TERAMPIL	D-III HUBUNGAN MASYARAKAT / D-III KOMUNIKASI	1	0	0	1	SEKRETARIS DEWAN, KEPALA BAGIAN FASILITAS PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN, KASUBBAG FASILITAS PENGAWASAN, PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	
9.	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA/TERAMPIL	D-III KOMPUTER	1	0	0	1	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, KABID PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA, KASIE PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PRANATA KOMPUTER	
10.	ANALIS AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1	0	0	1	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG, SEKRETARIS, KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
11.	ANALIS BAHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	S-1 ADMINISTRASI / S-1 MANAJEMEN / S-1 KETAHANAN NASIONAL / S-1 SOSIOLOGI	1	0	0	1	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KABID TENAGA KERJA, KASI PENEMPATAN DAN PELATIHAN KETENAGAKERJAAN	

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	CUMLAUDE	DISABILITAS	FORMASI UMUM	UNIT KERJA PENEMPATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	ANALIS BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	S-1 TEKNIK SIPIL	1	0	0	1	KEPALA DINAS PU, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, KABID PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, KASI KAWASAN DAN PEMUKIMAN	
13.	ANALIS BENIH	S-1 PERIKANAN	1	0	0	1	KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN, KABID PERIKANAN, KASI PRODUKSI PERIKANAN	
14.	ANALIS DOKUMEN PERIZINAN	S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI / S-1 PEMERINTAHAN	1	0	0	1	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KABID PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KASI PELAYANAN PERIJINAN USAHA	
15.	ANALIS HUKUM	S-1 HUKUM	1	0	0	1	CAMAT BETAYAU, KASIE PEMERINTAHAN	
16.	ANALIS JABATAN	S-1 MANAJEMEN SDM / S-1 ADMINISTRASI NEGARA	2	0	0	1	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, SEKRETARIS, KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				0	0	1	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN PEMBANGUNAN, KABAG ORGANISASI DAN TATA LAKSANA, KASUBBAG KELEMBAGAAN DAN ANALISA JABATAN	
17.	ANALIS JALAN JEMBATAN	S-1 TEKNIK SIPIL	1	0	0	1	KEPALA DINAS PU, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN, KEPALA BIDANG BINA MARGA, KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	
18.	ANALIS KAPASITAS PENYULUH	S-1 PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN	1	0	0	1	KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN, KABID KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUH, KASI PENYULUH	
19.	ANALIS KELEMBAGAAN	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	0	0	1	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN PEMBANGUNAN, KABAG ORGANISASI DAN TATA LAKSANA, KASUBBAG KELEMBAGAAN DAN ANALISA JABATAN	
20.	ANALIS KEMASYARAKATAN	S-1 SOSIOLOGI / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 PSIKOLOGI / S-1 SOSIAL POLITIK	1	0	0	1	KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KABID KETAHANAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR DESA, KASI KETAHANAN MASYARAKAT	
21.	ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	S-1 KEPENDUDUKAN / S-1 PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK	1	0	0	1	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, KABID PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, KASIE PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	
22.	ANALIS KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	S-1 PERIKANAN	1	0	0	1	KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN, KABID PERIKANAN, KASI PERLINDUNGAN SUMBER DAYA PERIKANAN	

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	CUMLAUDE	DISABILITAS	FORMASI UMUM	UNIT KERJA PENEMPATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	ANALIS KOMPETENSI	S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI / S-1 EKONOMI / S-1 PSIKOLOGI	1	0	0	1	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM, KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM APARATUR, KASUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI	
24.	ANALIS LAPORAN KEUANGAN	S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN	1	0	0	1	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG, SEKRETARIS, KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN	
25.	ANALIS MASALAH SOSIAL	S-1 PSIKOLOGI / S-1 MANAJEMEN / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 KRIMINOLOG	1	0	0	1	KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KABID SOSIAL, KASI DAYA SOSIAL DAN PENANGGULANGAN FAKIR MISKIN	
26.	ANALIS MITIGASI BENCANA	S-1 PSIKOLOGI / S-1 MANAJEMEN / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 KRIMINOLOGI	1	0	0	1	KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KABID SOSIAL, KASI PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL DAN REHABILITASI SOSIAL	
27.	ANALIS MUTU HASIL PERTANIAN	S-1 PERIKANAN / D-IV PERIKANAN	1	0	0	1	KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN, KABID PERIKANAN, KASI PENGUATAN DAYA SAING KELAUTAN DAN PERIKANAN	
28.	ANALIS PELABUHAN	S-1 MANAJEMEN TRANSPORTASI	1	0	0	1	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN, KABID PERHUBUNGAN, KASI PERHUBUNGAN LAUT DAN SUNGAI	
29.	ANALIS PELAYANAN	S-1 ILMU HUKUM / S-1 ADMINISTRASI NEGARA/ S-1 ADMINISTRASI NIAGA	1	0	0	1	CAMAT MURUK RIAN, KASIE PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	
30.	ANALIS PELAYANAN SOSIAL	S-1 PSIKOLOGI / S-1 SOSIOLOGI / S-1 KRIMINOLOGI / S-1 MANAJEMEN SDM	1	0	0	1	CAMAT MURUK RIAN, KASIE KESEJAHTERAAN SOSIAL, PENDAPATAN DAN KEKAYAAN	
31.	ANALIS PEMANFAATAN RUANG	S-1 TEKNIK PLANOLOGI / S-1 PERENCANAAN WILAYAH	1	0	0	1	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, KABAG TATA PEMERINTAHAN, KASUBBAG PERTANAHAN DAN PENATAAN WILAYAH	
32.	ANALIS PEMBANGUNAN	S-1 TEKNIK SIPIL	1	0	0	1	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN PEMBANGUNAN, KABAG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, KASUBBAG PENGENDALIAN PEMBANGUNAN, MONITORING DAN PELAPORAN	
33.	ANALIS PEMBAYARAN JAMINAN KESEHATAN	S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 EKONOMI MANAJEMEN	1	0	0	1	KEPALA DINAS KESEHATAN, KABID PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PELAYANAN KESEHATAN, KASI PELAYANAN KESEHATAN	
34.	ANALIS PEMERINTAHAN DAERAH	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	0	0	1	CAMAT MURUK RIAN, KASIE PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	
35.	ANALIS PENDAPATAN DAERAH	S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI AKUNTANSI	1	0	0	1	CAMAT BETAYAU, KASIE KESEJAHTERAAN SOSIAL, PENDAPATAN DAN KEKAYAAN	

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	CUMLAUDE	DISABILITAS	FORMASI UMUM	UNIT KERJA PENEMPATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36.	ANALIS PENGAMANAN LINGKUNGAN	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN	1	0	0	1	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN, KABID PENATAAN DAN PENATAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, KASI PENGADUAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN	
37.	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI	S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 PSIKOLOGI	1	0	0	1	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM, KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM APARATUR, KASUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI	
38.	ANALIS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA	S-1 TEKNIK SIPIL	1	0	0	1	KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KABID KETAHANAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR DESA, KASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR DESA DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	
39.	ANALIS PENGEMBANGAN SDM APARATUR	S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 PSIKOLOGI	1	0	0	1	KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KABID KETAHANAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR DESA, KASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR DESA DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	
40.	ANALIS PENGEMBANGAN WILAYAH	S-1 TEKNIK PLANOLOGI / S-1 PLANOLOGI / S-1 PENGEMBANGAN WILAYAH	1	0	0	1	CAMAT SESAYAP, KASIE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
41.	ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	1	0	0	1	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, KABAG TATA PEMERINTAHAN, KASUBBAG PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN DESA	
42.	ANALIS PEREKONOMIAN	S-1 EKONOMI MANAJEMEN	1	0	0	1	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN PEMBANGUNAN, KABAG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, KASUBBAG PEREKONOMIAN	
43.	ANALIS PERENCANAAN	S-1 EKONOMI MANAJEMEN	3	0	0	1	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, SEKRETARIS, KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN	
				0	0	1	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG, KABID PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, KASUBBID PERENCANAAN PENDANAAN, DATA DAN INFORMASI	
				0	0	1	CAMAT BETAYAU, SEKRETARIS, KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN	

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	CUMLAUDE	DISABILITAS	FORMASI UMUM	UNIT KERJA PENEMPATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44.	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK	2	0	0	1	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN, SEKRETARIS, KASUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	
				0	0	1	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG, SEKRETARIS, KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN	
45.	ANALIS PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN IKAN	S-1 PERIKANAN	1	0	0	1	KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN, KABID PERIKANAN, KASI PERLINDUNGAN SUMBER DAYA PERIKANAN	
46.	ANALIS PRODUK HUKUM	S-1 ILMU HUKUM	1	0	0	1	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, KABAG HUKUM, KASUBBAG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
47.	ANALIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN MASALAH SOSIAL	S-1 PSIKOLOGI / S-1 MANAJEMEN / S-1 SOSIOLOGI / S-1 KRIMINOLOGI	1	0	0	1	CAMAT SESAYAP, KASIE KESEJAHTERAAN SOSIAL, PENDAPATAN DAN KEKAYAAN	
48.	ANALIS PROGRAM PENYULUHAN	S-1 PERTANIAN	1	0	0	1	KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN, KABID KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUH, KASI PENYULUH	
49.	ANALIS REHABILITASI MASALAH SOSIAL	S-1 PSIKOLOGI / S-1 SOSIOLOGI	1	0	0	1	KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KABID SOSIAL, KASI PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL DAN REHABILITASI SOSIAL	
50.	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK	2	0	0	1	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, KABAG TATA PEMERINTAHAN, KASUBBAG PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN DESA	
				0	0	1	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG, SEKRETARIS, KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN	
51.	ANALIS SISTEM MUTU DAN LINGKUNGAN	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1	0	0	1	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN, KABID PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP, KASI PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
52.	ANALIS STANDARD HARGA	S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 HUKUM / S-1 PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI	1	0	0	1	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KABID KEUANGAN, KASUBID PERBENDAHARAAN	
53.	ANALIS STANDARDISASI BUDIDAYA	S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 HUKUM	1	0	0	1	KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN, KABID PERIKANAN, KASI PRODUKSI PERIKANAN	
54.	ANALIS TATA PRAJA	S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 PSIKOLOGI	2	0	0	1	CAMAT BETAYAU, KASIE PEMERINTAHAN	

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	CUMLAUDE	DISABILITAS	FORMASI UMUM	UNIT KERJA PENEMPATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				0	0	1	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, KABAG TATA PEMERINTAHAN, KEPALA SUBBAG PEMERINTAHAN UMUM	
55.	ANALIS TATA USAHA	S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 HUKUM	2	0	0	1	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM , SEKRETARIS, KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
						1	KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA, SEKRETARIS, KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
56.	OPERATOR KOMPUTER GRAFIS	D-III GRAFIKA / D-III MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA	1	0	0	1	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KABID KOMUNIKASI, KASI INFORMASI PUBLIK	
57.	PENATA LAPORAN KEUANGAN	S-1 EKONOMI AKUNTANSI	4	1	0	0	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM, SEKRETARIS, KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN	
				0	0	1	SEKRETARIS DEWAN, KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN, KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	
				0	0	1	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, SEKRETARIS, KASUBAG PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN	
				0	0	1	KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, SEKRETARIS, KASUBAG PERENCANAAN, PROGRAM DAN KEUANGAN	
58.	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	D-III PERKANTORAN	1	0	0	1	KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA, SEKRETARIS, KASUBAG. PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN	
59.	PENGAWAS LALU LINTAS HEWAN DAN WILAYAH KARANTINA HEWAN	S-1 PETERNAKAN	1	0	0	1	KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN, KABID PETERNAKAN, KASI KESEHATAN HEWAN, KESMAVET PENGOLAH DAN PEMASARAN	
60.	PENGAWAS MUTU BIBIT TERNAK	S-1 PERTANIAN / S-1 PETERNAKAN	1	0	0	1	KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN, KABID PETERNAKAN, KASI PEMBIBITAN DAN PRODUKSI	
61.	PENGAWAS SANITASI USAHA PETERNAKAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	S-1 PETERNAKAN	1	0	0	1	KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN, KABID PETERNAKAN, KASI KESEHATAN HEWAN, KESMAVET PENGOLAH DAN PEMASARAN	
62.	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN	1	0	0	1	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG, KABID PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, KASUBBID PERENCANAAN PENDANAAN, DATA DAN INFORMASI	

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	CUMLAUDE	DISABILITAS	FORMASI UMUM	UNIT KERJA PENEMPATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63.	PENGELOLA BAHAN PUSTAKA	D-III PERPUSTAKAAN / D-III ADMINISTRASI NEGARA	1	0	0	1	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN PEMBANGUNAN, KABAG ORGANISASI DAN TATA LAKSANA, KASUBBAG PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
64.	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI / D-III ADMINISTRASI NEGARA	5	0	0	1	CAMAT MURUK RIAN, SEKRETARIS, KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				0	0	1	KEPALA DINAS KESEHATAN, DIREKTUR RSUD AKHMAD BERAHIM (TIPE C), KASUBBAG TU	
				0	0	1	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN, SEKRETARIS, KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				0	0	1	KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, SEKRETARIS, KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				0	0	1	CAMAT BETAYAU, SEKRETARIS, KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
65.	PENGELOLA DATA DAMPAK BENCANA	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN	1	0	0	1	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KABID PENANGGULANGAN BENCANA, KASI KESIAPSIAGAAN	
66.	PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNIK KOMPUTER	1	0	0	1	CAMAT SESAYAP, KASIE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	
67.	PENGELOLA DATA KREATIVITAS DAN INOVASI	D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III PEMERINTAHAN / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA	1	0	0	1	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, KABID PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA, KASIE KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN	
68.	PENGELOLA DOKUMEN MENGENAI ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN	D-III TEKNIK LINGKUNGAN / D-III KESEHATAN LINGKUNGAN	1	0	0	1	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN, KABID PENATAAN DAN PENATAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, KASI PERENCANAAN DAN KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN	
69.	PENGELOLA EVALUASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN	D-III AKUNTANSI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI	1	0	0	1	INSPEKTUR, SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH, KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
70.	PENGELOLA GEOSPASIAL	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III GEOGRAFI / D-III MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA / D-III GEODESI	1	0	0	1	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, KABAG TATA PEMERINTAHAN, KASUBBAG PERTANAHAN DAN PENATAAN WILAYAH	
71.	PENGELOLA INFORMASI KEPARIWISATAAN	D-III PARIWISATA / D-III MANAJEMEN PARIWISATA	1	0	0	1	KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA, KABID PARIWISATA, KASIE PROMOSI WISATA	
72.	PENGELOLA KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	D-III PETERNAKAN	1	0	0	1	KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN, KABID PETERNAKAN, KASI KESEHATAN HEWAN, KESMAVET PENGOLAH DAN PEMASARAN	

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	CUMLAUDE	DISABILITAS	FORMASI UMUM	UNIT KERJA PENEMPATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73.	PENGELOLA KESEHATAN TERNAK BESAR, KECIL DAN UNGGAS	D-III PETERNAKAN / D-III KESEHATAN HEWAN	1	0	0	1	KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN, KABID PETERNAKAN, KASI KESEHATAN HEWAN, KESMAVET PENGOLAH DAN PEMASARAN	
74.	PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL	D-III KESEJAHTERAAN SOSIAL / D-III SOSIATRI	1	0	0	1	KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KABID SOSIAL, KASI DAYA SOSIAL DAN PENANGGULANGAN FAKIR MISKIN	
75.	PENGELOLA OBAT DAN ALAT-ALAT KESEHATAN	D-III FARMASI / D-III MANAJEMEN RUMAH SAKIT	1	0	0	1	KEPALA DINAS KESEHATAN, KABID. SUMBER DAYA KESEHATAN, KASI PEMANFAATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	
76.	PENGELOLA PAJAK DAERAH	D-III AKUNTANSI / D-III ADMINISTRASI	1	0	0	1	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KABID PENDATAAN, KASUBBID PBB DAN BPHTB	
77.	PENGELOLA PASCA PANEN	D-III PERTANIAN	1	0	0	1	KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN, KABID PETERNAKAN, KASI KESEHATAN HEWAN, KESMAVET PENGOLAH DAN PEMASARAN	
78.	PENGELOLA PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA	2	0	0	1	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, KABAG TATA PEMERINTAHAN, KEPALA SUBBAG PEMERINTAHAN UMUM	
				0	0	1	CAMAT SESAYAP, SEKRETARIS, KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN	
79.	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	D-III TEKNIK MESIN / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III PEMERINTAHAN / D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	0	0	1	INSPEKTUR, SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH, KEPALA SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
80.	PENGELOLA PENGENDALIAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	D-III AKUNTANSI / D-III ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN / D-III PEMERINTAHAN / D-III TEKNIK INFORMATIKA	2	0	0	1	INSPEKTUR, SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH, KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
				0	0	1	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG, KABID PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, KASUBBID PENGENDALIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	
81.	PENGELOLA PENYAKIT TIDAK MENULAR	D-III KESEHATAN MASYARAKAT	1	0	0	1	KEPALA DINAS KESEHATAN, KABID. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT, KASI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR	
82.	PENGELOLA PERPUSTAKAAN	D-III PERPUSTAKAAN	2	0	0	1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SEKOLAH SMPN TERPADU UNGGULAN 1 TANA TIDUNG	
				0	0	1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPALA SEKOLAH SMPN TERPADU UNGGULAN 2 TANA TIDUNG	

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	CUMLAUDE	DISABILITAS	FORMASI UMUM	UNIT KERJA PENEMPATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83.	PENGELOLA PROMOSI DAN INFORMASI WISATA	D-III MANAJEMEN PARIWISATA / D-III PARIWISATA	1	0	0	1	KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA, KABID PARIWISATA, KASIE PROMOSI WISATA	
84.	PENGELOLA REHABILITASI DAN PELAYANAN SOSIAL	D-III KESEJAHTERAAN SOSIAL / D-III SOSIATRI	2	0	0	1	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KABID REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI, KASUBID REHABILITASI	
				0	0	1	KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KABID SOSIAL, KASI PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL DAN REHABILITASI SOSIAL	
85.	PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN	D-III PEMERINTAHAN / D-III MANAJEMEN	1	0	0	1	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, KABID PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, KASIE PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	
86.	PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA	2	0	0	1	KEPALA DINAS KESEHATAN, SEKRETARIS, KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				0	0	1	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN, SEKRETARIS, KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
87.	PENGELOLA STATISTIK PERIKANAN	D-III PERIKANAN	1	0	0	1	KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN, KABID PERIKANAN, KASI PRODUKSI PERIKANAN	
88.	PENGELOLA USAHA TANI PETERNAKAN DAN KEHEWANAN	D-III PERTANIAN / D-III PERKEBUNAN / D-III PETERNAKAN	1	0	0	1	KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN, KABID PETERNAKAN, KASI PEMBIBITAN DAN PRODUKSI	
89.	PENGOLAH DATA ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	0	0	1	KEPALA BADAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KABID KEUANGAN, KASUBID PERBENDAHARAAN	
90.	PENGOLAH DATA INFORMASI DAN HUKUM	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN	1	0	0	1	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, KABAG HUKUM, KASUBBAG DOKUMENTASI HUKUM	
91.	PENGOLAH DATA KELEMBAGAAN	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	0	0	1	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, KABAG TATA PEMERINTAHAN, KASUBBAG PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN DESA	
92.	PENGOLAH DATA PERBENDAHARAAN	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	0	0	1	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KABID KEUANGAN, KASUBID PERBENDAHARAAN	
93.	PENGOLAH DATA SISTEM AKUNTANSI	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	0	0	1	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH, KABID KEUANGAN, KASUBID PERBENDAHARAAN	
94.	PENYULUH KEPEMUDAAN	S-1 MANAJEMEN / S-1 SOSIOLOGI / S-1 SOSIATRI	1	0	0	1	KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA, KABID PEMUDA DAN OLAH RAGA, KASIE KEPEMUDAAN	
95.	PENYULUH OLAH RAGA	S-1 OLAH RAGA / S-1 KEOLAHRAGAAN / S-1 KEPELATIHAN OLAH RAGA	1	0	0	1	KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA, KABID PEMUDA DAN OLAH RAGA, KASIE OLAH RAGA	

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	CUMLAUDE	DISABILITAS	FORMASI UMUM	UNIT KERJA PENEMPATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
96.	PENYUSUN BAHAN PENYULUHAN HUKUM	S-1 HUKUM	1	0	0	1	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, KABAG HUKUM, KASUBBAG BANTUAN HUKUM	
97.	PENYUSUN BAHAN PROSES PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN KETENAGAAN	S-1 HUKUM / S-1 PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1	0	0	1	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG, SEKRETARIS, KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
98.	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMAN	4	0	0	1	KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA, SEKRETARIS, KASUBAG PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN	
				0	0	1	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, KABAG TATA PEMERINTAHAN, KEPALA SUBBAG PEMERINTAHAN UMUM	
				0	0	1	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, SEKRETARIS, KASUBAG PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN	
				0	0	1	CAMAT SESAYAP HILIR, SEKRETARIS, KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN	
99.	PENYUSUN RANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	1	0	0	1	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, KABAG HUKUM, KASUBBAG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
100.	PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI	3	0	0	1	KEPALA DINAS KESEHATAN, DIREKTUR RSUD AKHMAD BERAHIM (TIPE C), KASUBBAG TU	
				0	0	1	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, SEKRETARIS, KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN	
				0	0	1	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG, SEKRETARIS, KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN	
101.	PERANCANG KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI / S-1 PEMERINTAHAN	1	0	0	1	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN PEMBANGUNAN, KABAG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, KASUBBAG PENGADAAN DAN JASA	
102.	PRANATA DIKLAT	D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III EKONOMI / D-III PSIKOLOGI	1	0	0	1	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM APARATUR, KASUBBID PENYELENGGARAAN DIKLAT PEGAWAI	
103.	PRANATA KEARSIPAN	D-III KEARSIPAN	2	0	0	1	KEPALA DINAS KESEHATAN, SEKRETARIS, KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				0	0	1	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH, SEKRETARIS, KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	CUMLAUDE	DISABILITAS	FORMASI UMUM	UNIT KERJA PENEMPATAN	KET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
104.	TEKNISI PERALATAN DAN MESIN	D-III TEKNIK MESIN / D-III TEKNIK LISTRIK / D-III TEKNIK ELEKTRO	1	0	0	1	ASISTEN ADMINISTRASI DAN PEMBANGUNAN, KABAG UMUM, SEKRETARIS, KEPALA SUBBAG RUMAH TANGGA	
105.	TEKNISI PERALATAN KANTOR	D-III TEKNIK MESIN / D-III TEKNIK ELEKTRO / D-III TEKNIK LISTRIK	1	0	0	1	INSPEKTUR, SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH, KEPALA SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

TIDENG PALE, 5 NOVEMBER 2019

BUPATI TANA TIDUNG,



H. UNDUNSYAH

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

I. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun 00 (nol) bulan 00 (nol) hari pada saat melamar pada <http://sscasn.bkn.go.id> ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan sesuai dengan yang tertera pada Ijazah;
3. Khusus untuk pelamar pada Jabatan Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Pendidik Klinis dan Dosen, Peneliti serta Perekayasa dengan kualifikasi pendidikan Strata Tiga (S-3/Doktor) sebagai jabatan tertentu dengan batas usia pelamar paling tinggi 40 (empat puluh) tahun 00 (nol) bulan 00 (nol) hari, pada saat melamar di <http://sscasn.bkn.go.id> ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan sesuai dengan yang tertera pada Ijazah;
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana atau kasus narkoba;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/Polri/pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
6. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Calon Anggota TNI/Polri serta Anggota TNI/Polri/Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
11. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
12. Berkelakuan baik;
13. Calon Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi/daerah dan 1 (satu) formasi jabatan dalam 1 (satu) jenis formasi (Formasi Umum/ Formasi Khusus Lulusan Terbaik (*Cumlaude*)/Formasi Khusus Disabilitas);
14. Calon pelamar merupakan lulusan dari Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama, dan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/ LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;

15. Untuk calon pelamar yang memiliki ijazah pendidikan dari luar negeri perlu dilampirkan penyetaraan Ijazah dan atau surat penetapan pengakuan sederajat dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan setelah dinilai lebih dahulu oleh tim penilai ijazah luar negeri di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
16. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Perguruan Tinggi yang Terakreditasi, minimal **2,30** (dua koma tiga nol) untuk pendaftar/pelamar yang berasal dari Kabupaten Tana Tidung (yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga);
17. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Perguruan Tinggi yang Terakreditasi, minimal **2,75** (dua koma tujuh lima) untuk pendaftar/pelamar yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Tana Tidung;
18. Ketentuan dan persyaratan bagi pelamar **formasi khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian (Cumlaude)** dari Perguruan Tinggi Dalam atau Luar Negeri :
 - a. Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat **Dengan Pujian (Cumlaude)** dari Perguruan Tinggi Dalam atau Luar Negeri minimal jenjang pendidikan Strata 1, tidak termasuk Diploma Empat (D-IV);
 - b. Calon pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat **Dengan pujian (cumlaude)** dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada Ijazah;
 - c. Calon pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusan setara dengan angka b) diatas dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
19. Ketentuan dan persyaratan bagi **pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada formasi khusus Penyandang Disabilitas :**
 - a. Calon pelamar dari penyandang disabilitas wajib melampirkan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah / Puskesmas yang menerangkan jenis dan tingkat / derajat kedisabilitasnya sebagaimana format terlampir;
 - b. Bagi peserta penyandang disabilitas Sensorik Netra yang mendaftar pada formasi khusus penyandang disabilitas diberikan tambahan waktu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) masing-masing selama 120 (seratus dua puluh) menit;
 - c. Bagi pelamar penyandang disabilitas Sensorik Netra yang mendaftar pada Formasi Umum atau Formasi Khusus Lain, selain Formasi Khusus Penyandang Disabilitas, tata cara dan waktu pelaksanaan seleksi sama dengan pelaksanaan seleksi pendaftar pada Formasi Umum;
 - d. Panitia wajib melakukan verifikasi persyaratan pendaftaran dengan mengundang/melihat calon pelamar untuk memastikan kesesuaian formasi dengan tingkat/derajat disabilitas yang disandang.
20. Ketentuan dan persyaratan bagi **pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada formasi umum dan formasi khusus lain (selain formasi khusus disabilitas) :**
 - a. Pada saat mendaftar di SSCASN pada jabatan dan unit penempatan tertentu, pelamar disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan/pelamar merupakan penyandang disabilitas dan

dibuktikan dengan dokumen / surat keterangan resmi yang hanya berlaku dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan jenis dan tingkat/derajat kedisabilitasnya, dan dokumen dimaksud harus diunggah pada SSCASN;

- b. Pada saat memverifikasi persyaratan administrasi, panitia wajib memeriksa dokumen tersebut sebagaimana dimaksud huruf a dan menentukan apakah jabatan dan unit penempatan yang dipilih dapat dilamar atau tidak dapat dilamar oleh penyandang disabilitas;
 - c. Apabila panitia menyatakan jabatan dan unit penempatan yang dimaksud dapat dilamar oleh penyandang disabilitas maka panitia wajib mengundang/melihat yang bersangkutan untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan tingkat/derajat kedisabilitasnya sebelum mengumumkan kelulusan seleksi administrasi;
 - d. Tata cara dan waktu pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sama dengan Formasi Umum yaitu 90 (Sembilan puluh) menit (disabilitas sensorik netra tidak diberikan pendampingan dan perpanjangan waktu);
 - e. Nilai ambang batas / *passing grade* mengikuti nilai ambang batas / *passing grade* Formasi Umum;
 - f. Apabila terdapat pelamar disabilitas yang melamar pada Formasi Umum dan Formasi Khusus selain Formasi Disabilitas, namun tidak melampirkan dokumen / surat keterangan yang menyatakan jenis dan tingkat / derajat kedisabilitasnya, dan kemudian hari terbukti bahwa calon pelamar tersebut adalah benar sebagai penyandang disabilitas maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat menggugurkan keikutsertaan/ kelulusan yang bersangkutan.
21. Pengaturan terhadap Pelamar yang termasuk Kategori P1/TL.
- a. Pelamar dari kategori P1/TL adalah peserta seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 dan memenuhi nilai ambang batas / *passing grade* berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 serta masuk dalam 3 (tiga) kali formasi jabatan yang dilamar untuk dapat mengikuti SKB tahun 2018, namun dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir.
 - b. Pelamar dari P1/TL wajib mendaftar di SSCASN dengan menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi CPNS Tahun 2018 dan dilakukan proses pendaftaran / pengunggahan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh instansi yang dilamarnya. Instansi selanjutnya melakukan seleksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan administrasi maka dapat digugurkan.
 - c. Sistem SSCASN BKN akan menampilkan data pelamar P1/TL tersebut mencakup jenis formasi yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nilai SKD Tahun 2018, status masuk atau tidak pada 3 (tiga) kali formasi pada jabatan yang dilamar, dan status lulus atau tidak sampai dengan tahap akhir pada seleksi CPNS Tahun 2018.
 - d. Pelamar P1/TL memilih jabatan dan jenis formasi yang akan dilamar. Secara sistem, nilai SKD Tahun 2018 sah digunakan oleh pelamar apabila:
 - 1) Nilai SKD tahun 2018 memenuhi nilai ambang batas / *passing grade* SKD Tahun 2019 untuk jabatan dan jenis formasi yang akan dilamarnya.

- 2) Kualifikasi pendidikan pada formasi jabatan yang dilamar tahun 2019 harus sama dengan kualifikasi pendidikan yang telah digunakan pada saat pelamaran tahun 2018.
 - e. Pelamar P1/TL harus memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti SKD Tahun 2019 pada sistem SSCASN.
 - f. Bagi pelamar P1/TL yang memilih untuk mengikuti SKD Tahun 2019, kemudian tidak mengikuti SKD tersebut dinyatakan gugur.
 - g. Bagi pelamar P1/TL yang memilih untuk tidak mengikuti SKD Tahun 2019, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018.
 - h. Apabila nilai SKD Tahun 2019 yang diperoleh pelamar memenuhi nilai ambang batas / *passing grade* SKD tahun 2019 untuk formasi jabatan yang dilamarnya, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai terbaik diantara nilai SKD Tahun 2018 dengan nilai SKD Tahun 2019.
 - i. Apabila nilai SKD Tahun 2019 tidak memenuhi nilai ambang batas / *passing grade*, maka yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018.
 - j. Nilai SKD peserta P1/TL sebagaimana dimaksud pada huruf (g) atau huruf (h) atau huruf (i), akan diperingkat dengan nilai SKD dari peserta seleksi CPNS Tahun 2019 lainnya yang memenuhi nilai ambang batas / *passing grade* pada jenis formasi dan jabatan yang dilamar untuk menentukan peserta yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali formasi berdasarkan peringkat tertinggi.
 - k. Tahapan selanjutnya, mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 dan Peraturan Perundang-Undangan.
22. Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian).

II. PERSYARATAN KHUSUS

1. Membuat surat lamaran yang dibuat dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam, menggunakan huruf kapital, pada kertas double folio bergaris dan ditanda tangani asli di atas materai Rp. 6000,- **sebanyak 1 (satu) rangkap** ditujukan Kepada Bupati Tana Tidung di Tideng Pale, dengan melampirkan:
 - a. Asli Ijazah Perguruan Tinggi yang berbahasa Indonesia dan **BUKAN** berbahasa Inggris (Asing) serta Fotokopi yang disahkan/dilegalisir oleh **Rektor/Dekan/Ketua/Direktur** bagi **Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik**, dengan tanda tangan dan stempel basah, bukan tanda tangan dan stempel fotokopi atau Scan;
 - b. Asli Transkrip Nilai Akademik yang berbahasa Indonesia dan **BUKAN** berbahasa Inggris (Asing) serta Fotokopi yang disahkan/ dilegalisir oleh **Pejabat Berwenang**, dengan tanda tangan dan stempel basah, bukan tanda tangan dan stempel fotokopi atau Scan;
 - c. Fotokopi Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/ LAM-PTKes pada saat kelulusan;
 - d. Bagi pelamar/pendaftar pada formasi Jabatan Tenaga Kesehatan **WAJIB** menyertakan/melampirkan Asli Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku/ aktif, **BUKAN STR Internship** sesuai jabatan yang dilamar (*linier*). Surat Tanda Registrasi (STR) Definitif yang masih berlaku / aktif tersebut

- difotokopi yang disahkan/dilegalisir oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MKTI)/ Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP)/ Pejabat yang Berwenang menurut peraturan perundang-undangan (*Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 dan Permenkes RI Nomor 46 Tahun 2013*);
- e. Pendaftar formasi Tenaga Kesehatan yang diwajibkan memiliki STR wajib mengunggah / *upload* STR dimaksud pada SSCASN BKN;
 - f. Bagi pelamar/pendaftar pada formasi Jabatan Guru DAPAT menyertakan /melampirkan Asli Sertifikat Pendidik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta fotokopi yang disahkan/dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang (*Permendikbud Nomor 37 Tahun 2017*);
 - g. **Tidak menerima** calon pelamar yang menggunakan Surat Keterangan Lulus (SKL);
 - h. Pas photo **WAJIB** berlatar belakang merah ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar dan 4x6 cm sebanyak 3 lembar, dengan menuliskan nama dan jabatan yang dilamar pada belakang pas photo;
 - i. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara, dan lain-lain yang ditandatangani di atas materai Rp. 6000 oleh calon pelamar sebagaimana format terlampir;
 - j. Surat Pernyataan tidak akan mengajukan pindah tugas dengan alasan apapun meskipun yang bersangkutan tetap mengajukan pindah, sebelum memiliki masa kerja/mengabdikan sekurang-kurangnya selama **20 (Dua Puluh) Tahun** terhitung sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, yang ditanda tangani di atas materai Rp. 6000 oleh calon pelamar dan diketahui oleh suami/istri/ orang tua/ wali, sebagaimana format terlampir;
 - k. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku serta Fotokopi yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
2. Dalam lamaran harus menyebutkan jabatan yang akan dilamar;
 3. Penerimaan lamaran dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dalam pengumuman;
 4. Semua kelengkapan tersebut disusun rapi sesuai dengan urutan di atas dan dimasukkan dalam map:
 - a. Warna Merah : Tenaga Guru
 - b. Warna Hijau : Tenaga Kesehatan
 - c. Warna Kuning : Tenaga Teknis
 - d. Warna Biru : *Cumlaude / Disabilitas*

Pada bagian depan map tersebut ditulis NAMA LENGKAP, PENDIDIKAN, JABATAN YANG DILAMAR, ALAMAT LENGKAP SESUAI KTP DAN KK, NOMOR TELEPON/HP.

III. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Calon pelamar seleksi penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019 dapat melakukan pendaftaran secara *Online* ke alamat website Portal SSCASN 2019 <http://sscasn.bkn.go.id>;
2. Pada saat pendaftaran secara *online*, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran *online* dan mencermati setiap keterangan/ instruksi/pemberitahuan/peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran *online* tersebut.

3. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019 wajib memiliki Surat Elektronik (*email*) yang masih aktif/berlaku.
4. Untuk melakukan pendaftaran secara *online*, Calon Pelamar Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019, wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Calon Pelamar, Nomor Kartu Keluarga (KK), dan NIK Kepala Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Calon Pelamar;
5. Pendaftaran dilakukan 2 (dua) tahap yaitu pendaftaran awal untuk akun Calon Peserta Seleksi di Portal SSCASN (<https://sscasn.bkn.go.id>) dilanjutkan dengan pendaftaran formasi jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan pelamar yang sudah ditentukan dalam pengumuman. Untuk daerah yang menggunakan SSCASN dapat langsung ke menu LOGIN di Portal SSCASN;
6. Calon Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi/daerah dan 1 (satu) formasi jabatan dalam 1 (satu) jenis formasi (Formasi Umum/Formasi Khusus Lulusan Terbaik (*Cumlaude*)/Formasi Khusus Disabilitas);
7. Seleksi atau tes dilakukan secara nasional dengan menggunakan sistem CAT(*Computer Assisted Test*);
8. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat;
9. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar, bukan menghubungi ke Instansi/Daerah/Badan Kepegawaian Negara/Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tana Tidung;
10. Pada halaman daftar SSCASN, pelamar mengisi dan membandingkan data di KTP dengan data Ijazah. Proses pemberkasan CPNS menggunakan data Ijazah sebagai data pokok kepegawaian yang terdiri dari Nama sesuai Ijazah tanpa Gelar, Tempat dan Tanggal Lahir. Pastikan bahwa Anda mengisi data tersebut dengan benar;
11. Pastikan Anda mengisi semua data dengan benar dan lengkap. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah;
12. Jika Anda telah berhasil melakukan pendaftaran ke Portal SSCASN 2019, selanjutnya Anda harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCASN 2019. Simpan Kartu tersebut dengan baik;
13. Setelah pelamar berhasil daftar, silahkan LOGIN ke <https://sscasn.bkn.go.id>, kemudian masukan NIK dan PASSWORD yang telah Anda daftarkan, lalu akan tampil halaman FORM BIODATA PESERTA;
14. Setelah pelamar mengisi biodata, pelamar dapat melanjutkan proses pendaftaran Instansi/Daerah yang dituju;
15. Pilih jenis Formasi sesuai dengan formasi yang dibuka oleh Instansi/Daerah. Pilihan jenis formasi dapat dilihat di Pengumuman;

16. Pastikan bahwa pelamar sudah yakin akan melamar di Instansi/Daerah tersebut karena Calon Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi/daerah dan 1 (satu) formasi jabatan dalam 1 (satu) jenis formasi (Formasi Umum/Formasi Khusus Lulusan Terbaik (*Cumlaude*)/Formasi Khusus Disabilitas);
17. Setelah semua tahapan pendaftaran selesai, data pelamar akan masuk ke data base SSCASN 2019, selanjutnya pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran;
18. Setelah pelamar menyelesaikan pendaftaran *online*, pelamar **WAJIB** menyerahkan semua berkas persyaratan yang telah ditentukan, ditambah dengan *print out* asli Tanda Bukti Pendaftaran *online* SSCASN 2019 beserta dokumen lamaran lengkapnya untuk diverifikasi.
19. Dokumen **WAJIB diantar langsung** oleh pelamar/pendaftar ke Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tana Tidung Jl. Perintis, Gedung Mess Guru, Desa Tideng Pale, Kab. Tana Tidung, **SETIAP HARI** selama periode waktu penyerahan berkas, pukul 08.00 s.d 16.00 Wita;
20. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi Daerah, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
21. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCASN 2019 dapat dilihat atau diunduh di laman <https://sscasn.bkn.go.id/alur>;

IV. PELAKSANAAN UJIAN

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan melalui situs *online* <https://www.bkpsdmktt.org> dan media resmi lainnya milik Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;
2. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT);
3. Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi dapat mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui situs *Online* <http://sscasn.bkn.go.id>.
4. Syarat mengikuti ujian dengan membawa:
 - a. KTP & KK asli,
 - b. Ijazah asli berbahasa Indonesia dan **BUKAN** berbahasa Inggris (Asing),
 - c. Transkrip nilai akademik asli berbahasa Indonesia dan **BUKAN** berbahasa Inggris (Asing), dan
 - d. Kartu Tanda Peserta Ujian Asli.
5. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan sebagaimana tersebut pada poin (4), peserta **TIDAK DAPAT** mengikuti ujian dan dinyatakan **GUGUR**;
6. Pengumuman dan jadwal ujian dapat dilihat di situs *online* BKPSDM Kabupaten Tana Tidung <https://www.bkpsdmktt.org> atau media resmi lainnya;
7. Apabila peserta ujian tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, peserta **TIDAK DAPAT** mengikuti ujian dan dinyatakan **GUGUR**;
8. Apabila peserta datang terlambat pada saat ujian telah berlangsung, maka peserta tetap dapat mengikuti ujian selama sisa waktu yang tersisa pada sesi tersebut;

9. Materi Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari:
- a. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS menggunakan sistem CAT meliputi:
 - 1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
 - 2) Tes Intelegensi Umum (TIU).
 - 3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Formasi Umum CPNS Tahun 2019 didasarkan pada nilai ambang batas (*passing grade*) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- b. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
 - 1) Materi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
 - a) Materi SKB untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi Pembina jabatan fungsional dan diintegrasikan dalam bank soal CAT BKN;
 - b) Materi SKB untuk jabatan pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal SKB yang rumpunnya sesuai dengan Jabatan Fungsional terkait;
 - 2) Peserta dan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
 - a) Jumlah peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan/formasi pada masing-masing Jabatan berdasarkan peringkat nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
 - b) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di Instansi Daerah **WAJIB** menggunakan CAT;
 - c) Instansi Daerah yang menyelenggarakan SKB tambahan selain dengan CAT, wajib menetapkan pedoman/panduan pelaksanaan SKB dan menyampaikan kepada Menteri PAN RB dengan tembusan Kepala BKN selaku Ketua Tim Pelaksana PANSELNAS.
 - 3) Pelaksanaan dan pengolahan hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
 - a) Setiap instansi/daerah dalam hal pelaksanaan seleksi dan penyampaian hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) berkoordinasi dengan PANSELNAS yang secara teknis dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara;
 - b) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di masing-masing instansi/daerah menjadi tanggung jawab Panitia Pelaksana Seleksi CPNS Instansi/Daerah;
 - c) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di Instansi Daerah **WAJIB** menggunakan CAT;
 - d) Bobot hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yaitu:
 - (1) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan bobot 40%;
 - (2) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60%;
 - e) Dalam hal Instansi melaksanakan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan CAT, hasil SKB dengan CAT merupakan nilai utama dengan bobot serendah-rendahnya 50% dari bobot nilai SKB;
 - f) Instansi Daerah hanya diperkenankan menambah 1 (satu) jenis tes selain Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan CAT dan diberikan bobot paling tinggi 40% dari total nilai/hasil SKB, sehingga bobot nilai SKB dengan CAT menjadi 60% dari total nilai/hasil SKB;

- g) Pengolahan hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi masing-masing yang hasilnya disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Tim Pelaksana PANSELNAS dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*, selanjutnya *softcopy* disampaikan pula kepada Tim Pengarah (Sekretariat);
 - h) Pengolahan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Tim Pelaksana PANSELNAS;
10. Prinsip dan Penentu Kelulusan
- a. Prinsip penentuan kelulusan peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*):
 - b. Nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) Seleksi Kompetensi Dasar diatur dalam Peraturan Menteri secara tersendiri;
 - c. Apabila peserta seleksi memperoleh nilai kelulusan yang sama setelah integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
 - 1) Nilai total hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang lebih tinggi;
 - 2) Apabila angka 1) masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - 3) Apabila angka 2) masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai IPK bagi lulusan Diploma/Sarjana/Magister, sedangkan untuk lulusan SMA/ sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertulis di ijazah; dan
 - 4) Apabila angka 3) masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia tertinggi.
 - d. Dalam hal kebutuhan formasi umum belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi khusus pada jabatan dan kualifikasi Pendidikan yang bersesuaian serta memenuhi nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) peringkat terbaik;
 - e. Dalam hal kebutuhan formasi khusus belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum dan formasi khusus lainnya pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian serta memenuhi nilai ambang batas kelulusan peringkat terbaik;
 - f. Apabila tahapan sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) dan huruf (e) masih terdapat formasi yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada Formasi Umum dan Formasi Khusus lainnya yang jabatan dan kualifikasi pendidikannya sama dari unit penempatan / lokasi formasi yang berbeda serta memenuhi nilai ambang batas (*passing grade*) SKD Formasi Umum dan berperingkat terbaik;
 - g. Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dari Badan Kepegawaian Negara.
 - h. Penetapan dan pengumuman terhadap peserta seleksi yang dinyatakan lulus tahap akhir tidak melebihi jumlah formasi pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

- i. Peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus wajib membuat Surat Pernyataan tidak akan mengajukan pindah tugas dengan alasan apapun meskipun yang bersangkutan tetap mengajukan pindah, sebelum memiliki masa kerja/mengabdikan sekurang-kurangnya selama **20 (Dua Puluh) Tahun** terhitung sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, yang ditanda tangani di atas materai Rp. 6000 oleh calon pelamar dan diketahui oleh suami/istri/ orang tua/wali.
- j. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud huruf (h) tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan membuat Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari CPNS/PNS Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang ditandatangani di atas materai Rp. 6000;
- k. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan;
- l. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk periode berikutnya.

V. KETENTUAN LAIN

1. Seleksi penerimaan CPNS Tahun 2019 wajib menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*).
2. Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan di UPT BKN Tarakan di Tarakan.
3. Pihak Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan CPNS Tahun 2019, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019.
4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang/dalam bentuk lain;
5. Kelulusan peserta adalah prestasi dari peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta, keluarga, dan pihak lain, dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019, apabila diketahui maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
6. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CPNS Tahun 2019 hanya dapat dilihat dalam situs *Online Portal SSCASN Tahun 2019*.
7. Para pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut untuk melihat waktu dan tempat pelaksanaan ujian atau pengumuman-pengumuman penting lainnya.

8. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka Pemerintah Kabupaten Tana Tidung berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
9. Untuk mengikuti seluruh seleksi CPNS Tahun 2019, para peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun.
10. Keputusan Tim Pengadaan CPNS Tahun 2019 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
11. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCASN Tahun 2019 <http://sscasn.bkn.go.id> dan <https://www.bkpsdmktt.org> serta media resmi lainnya.
12. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019 dapat menghubungi nomor HP : 081348329409 (hanya menerima *WhatsApp* dan SMS) pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d. 16.00 Wita; email : bkpsdmtanatidung@gmail.com
13. Ketentuan lainnya dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;

VI. JADWAL SELEKSI

NO	KEGIATAN	JADWAL	KET
1	Pengumuman Kebutuhan Formasi	5 - 19 November 2019	TENTATIF
2	Pembukaan Pendaftaran secara Online https://sscasn.bkn.go.id	11 - 24 November 2019	TENTATIF
3	Penyerahan Berkas	11 - 30 November 2019	TENTATIF
4	Seleksi Administrasi dan Verifikasi Online	13 November - 12 Desember 2019	TENTATIF
5	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	16 Desember 2019	TENTATIF
6	Masa sanggah	16 - 19 Desember 2019	TENTATIF
7	Pengumuman Sanggah	26 Desember 2019	TENTATIF
8	Pengumuman Pelaksanaan SKD	Januari 2020	TENTATIF
9	Pelaksanaan SKD	Februari 2020	TENTATIF
10	Pengumuman Hasil SKD	Maret 2020	TENTATIF
11	Pelaksanaan SKB	Maret 2020	TENTATIF
12	Integrasi Nilai SKD dan SKB	April 2020	TENTATIF
13	Usul Penetapan NIP	April 2020	TENTATIF

Catatan : Jadwal di atas adalah bersifat TENTATIF, apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi, akan diumumkan melalui website <http://sscasn.bkn.go.id> dan <https://www.bkpsdmktt.org> serta media lainnya.

Tideng Pale, 05 November 2019



BUPATI,

H. UNDUNSYAH

CONTOH SURAT LAMARAN PESERTA CPNS (TULISAN TANGAN)

TENAGA KESEHATAN

TIDENG PALE,.....NOVEMBER 2019

KEPADA YTH:
BUPATI TANA TIDUNG
DI-
TIDENG PALE

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:

NAMA : ADENIA, A.Md.Keb
TEMPAT LAHIR (KAB/KOTA) : TARAKAN
TANGGAL LAHIR : 17 AGUSTUS 1990
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
AGAMA : ISLAM
PENDIDIKAN TERAKHIR : D-III KEBIDANAN
IPK : 2,30
ALAMAT ASAL (KTP) : -
ALAMAT DI TANJUNG SELOR : -
NOMOR TELPON/HP : (021)1234567/ 0812345678910

DENGAN INI MENYAMPAIKAN PERMOHONAN KEPADA BAPAK, AGAR DAPAT MENGIKUTI SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN ANGGARAN 2019 DALAM JABATAN, UNIT KERJA PENEMPATAN

SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BAPAK, BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN MASING-MASING DALAM RANGKAP 1 (SATU):

1. SURAT LAMARAN BERMATERAI RP.6000,- DITUJUKAN KEPADA BUPATI TANA TIDUNG DAN DI TANDA TANGANI DENGAN PENYA BERTINTA HITAM;
2. FOTOKOPI IJAZAH PERGURUAN TINGGI SESUAI DENGAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIBUTUHKAN/DILAMAR, YANG DISAHKAN/DILEGALISIR OLEH REKTOR/DEKAN/KETUA/DIREKTUR BAGI UNIVERSITAS/INSTITUT/SEKOLAH TINGGI/AKADEMI/POLITEKNIK, DENGAN TANDA TANGAN DAN STEMPEL BASAH, BUKAN TANDA TANGAN DAN STEMPEL FOTOKOPI/SCAN;
3. FOTOKOPI TRANSKRIP NILAI AKADEMIK PERGURUAN TINGGI YANG DISAHKAN/DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG, DENGAN TANDA TANGAN DAN STEMPEL BASAH, BUKAN TANDA TANGAN DAN STEMPEL FOTOKOPI/SCAN;
4. FOTOKOPI SERTIFIKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM STUDI OLEH BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI (BAN-PT) DAN/ATAU PUSDIKNAKES/LAM-PTKES PADA SAAT KELULUSAN YANG DISAHKAN/DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG;
5. FOTOKOPI SURAT TANDA REGISTRASI (STR) YANG DISAHKAN/DILEGALISIR OLEH MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA (MKTI)/ MAJELIS TENAGA KESEHATAN PROVINSI (MTKP)/PEJABAT YANG BERWENANG MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
6. PAS PHOTO BERLATAR BELAKANG MERAH UKURAN 3X4 CM SEBANYAK 3 LEMBAR DAN 4X6 CM SEBANYAK 3 LEMBAR;
7. SURAT PERNYATAAN YANG DITANDA TANGANI DI ATAS MATERAI RP.6000,- OLEH CALON PELAMAR;
8. SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENGAJUKAN PINDAH TUGAS DENGAN ALASAN APAPUN SEBELUM MEMILIKI MASA KERJA/MENGABDI SEKURANG-KURANGNYA 20 (DUA PULUH) TAHUN SEJAK DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN KABUPATEN TANA TIDUNG DI ATAS MATERAI RP.6000, OLEH CALON PELAMAR DAN DIKETAHUI OLEH SUAMI/ISTRI/ORANG TUA/WALI;
9. FOTOKOPI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DAN KARTU KELUARGA (KK) YANG MASIH BERLAKU DAN DISAHKAN/DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG;
10. LEMBAR BUKTI/KARTU PENDAFTARAN SSCASN TAHUN 2019;

DEMIKIAN SURAT LAMARAN INI DIBUAT. ADAPUN SELURUH DATA DAN DOKUMEN YANG SAYA BERIKAN ADALAH BENAR. APABILA DIKEMUDIAN HARI DITEMUKAN DATA YANG TIDAK BENAR, MAKA SAYA MENERIMA KEPUTUSAN PANITIA MEMBATALKAN KEIKUTSERTAAN/KELULUSAN SAYA PADA SELEKSI CPNS PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN ANGGARAN 2019. ATAS PERHATIANNYA DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

HORMAT SAYA,

Materai RP.6000,-

ADENIA, A.Md.Keb.

CONTOH SURAT LAMARAN PESERTA CPNS (TULISAN TANGAN)

TENAGA GURU

TIDENG PALE,.....NOVEMBER 2019

KEPADA YTH:
BUPATI TANA TIDUNG
DI-
TIDENG PALE

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:

NAMA : DENYADY, S.Pd.
TEMPAT LAHIR (KAB/KOTA) : BULUNGAN
TANGGAL LAHIR : 18 AGUSTUS 1990
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
AGAMA : ISLAM
PENDIDIKAN TERAKHIR : S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA
IPK : 2,30
ALAMAT ASAL (KTP) : -
ALAMAT DI TANJUNG SELOR : -
NOMOR TELPON/HP : (021)1234567/ 0812345678910

DENGAN INI MENYAMPAIKAN PERMOHONAN KEPADA BAPAK, AGAR DAPAT MENGIKUTI SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN ANGGARAN 2019 DALAM JABATAN, UNIT KERJA PENEMPATAN

SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BAPAK, BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN MASING-MASING DALAM RANGKAP 1 (SATU):

1. SURAT LAMARAN BERMATERAI RP.6000,- DITUJUKAN KEPADA BUPATI TANA TIDUNG DAN DITANDA TANGANI DENGAN PENA BERTINTA HITAM;
2. FOTOKOPI IJAZAH PERGURUAN TINGGI SESUAI DENGAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIBUTUHKAN/DILAMAR, YANG DISAHKAN/DILEGALISIR OLEH REKTOR/DEKAN/KETUA/DIREKTUR BAGI UNIVERSITAS/INSTITUT/SEKOLAH TINGGI/AKADEMI/POLITEKNIK, DENGAN TANDA TANGAN DAN STEMPEL BASAH, BUKAN TANDA TANGAN DAN STEMPEL FOTOKOPI/SCAN;
3. FOTOKOPI TRANSKRIP NILAI AKADEMIK PERGURUAN TINGGI YANG DISAHKAN/DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG, DENGAN TANDA TANGAN DAN STEMPEL BASAH, BUKAN TANDA TANGAN DAN STEMPEL FOTOKOPI/SCAN;
4. FOTOKOPI SERTIFIKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM STUDI OLEH BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI (BAN-PT) DAN/ATAU PUSDIKNAKES/LAM-PTKES PADA SAAT KELULUSAN YANG DISAHKAN/DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG;
5. FOTOKOPI SERTIFIKAT PENDIDIK YANG DISAHKAN/DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG, JIKA ADA SERTIFIKAT PENDIDIK;
6. PAS PHOTO BERLATAR BELAKANG MERAH UKURAN 3X4 CM SEBANYAK 3 LEMBAR DAN 4X6 CM SEBANYAK 3 LEMBAR;
7. SURAT PERNYATAAN YANG DITANDA TANGANI DI ATAS MATERAI RP.6000,- OLEH CALON PELAMAR;
8. SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENGAJUKAN PINDAH TUGAS DENGAN ALASAN APAPUN SEBELUM MEMILIKI MASA KERJA/MENGABDI SEKURANG-KURANGNYA 20 (DUA PULUH) TAHUN SEJAK DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN KABUPATEN TANA TIDUNG DI ATAS MATERAI RP.6000, OLEH CALON PELAMAR DAN DIKETAHUI OLEH SUAMI/ISTRI/ORANG TUA/WALI;
9. FOTOKOPI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DAN KARTU KELUARGA (KK) YANG MASIH BERLAKU DAN DISAHKAN/DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG;
10. LEMBAR BUKTI/KARTU PENDAFTARAN SSCASN TAHUN 2019;

DEMIKIAN SURAT LAMARAN INI DIBUAT. ADAPUN SELURUH DATA DAN DOKUMEN YANG SAYA BERIKAN ADALAH BENAR. APABILA DIKEMUDIAN HARI DITEMUKAN DATA YANG TIDAK BENAR, MAKA SAYA MENERIMA KEPUTUSAN PANITIA MEMBATALKAN KEIKUTSERTAAN/KELULUSAN SAYA PADA SELEKSI CPNS PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN ANGGARAN 2019. ATAS PERHATIANNYA DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

HORMAT SAYA,

Materai RP.6000,-

DENYADY, S.Pd.

CONTOH SURAT LAMARAN PESERTA CPNS (TULISAN TANGAN)

TENAGA TEKNIS

TIDENG PALE,.....NOVEMBER 2019

KEPADA YTH:
BUPATI TANA TIDUNG
DI-
TIDENG PALE

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:

NAMA : ARYO WIGUNO, S.Kom
TEMPAT LAHIR (KAB/KOTA) : NUNUKAN
TANGGAL LAHIR : 19 AGUSTUS 1990
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
AGAMA : ISLAM
PENDIDIKAN TERAKHIR : S-1 TEKNIK INFORMATIKA
IPK : 2,30
ALAMAT ASAL (KTP) : -
ALAMAT DI TANJUNG SELOR : -
NOMOR TELPON/HP : (021)1234567/ 0812345678910

DENGAN INI MENYAMPAIKAN PERMOHONAN KEPADA BAPAK, AGAR DAPAT MENGIKUTI SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN ANGGARAN 2019 DALAM JABATAN, UNIT KERJA PENEMPATAN

SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BAPAK, BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN MASING-MASING DALAM RANGKAP 1 (SATU):

1. SURAT LAMARAN BERMATERAI RP.6000,- DITUJUKAN KEPADA BUPATI TANA TIDUNG DAN DITANDA TANGANI DENGAN PENA BERTINTA HITAM;
2. FOTOKOPI IJAZAH PERGURUAN TINGGI SESUAI DENGAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIBUTUHKAN/DILAMAR, YANG DISAHKAN/DILEGALISIR OLEH REKTOR/DEKAN/KETUA/DIREKTUR BAGI UNIVERSITAS/INSTITUT/SEKOLAH TINGGI/AKADEMI/POLITEKNIK, DENGAN TANDA TANGAN DAN STEMPEL BASAH, BUKAN TANDA TANGAN DAN STEMPEL FOTOKOPI/SCAN;
3. FOTOKOPI TRANSKRIP NILAI AKADEMIK PERGURUAN TINGGI YANG DISAHKAN/DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG, DENGAN TANDA TANGAN DAN STEMPEL BASAH, BUKAN TANDA TANGAN DAN STEMPEL FOTOKOPI/SCAN;
4. FOTOKOPI SERTIFIKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM STUDI OLEH BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI (BAN-PT) DAN/ATAU PUSDIKNAKES/LAM-PTKES PADA SAAT KELULUSAN YANG DISAHKAN/DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG;
5. PAS PHOTO BERLATAR BELAKANG MERAH UKURAN 3X4 CM SEBANYAK 3 LEMBAR DAN 4X6 CM SEBANYAK 3 LEMBAR;
6. SURAT PERNYATAAN YANG DI TANDA TANGANI DI ATAS MATERAI RP.6000,- OLEH CALON PELAMAR;
7. SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENGAJUKAN PINDAH TUGAS DENGAN ALASAN APAPUN SEBELUM MEMILIKI MASA KERJA/MENGABDI SEKURANG-KURANGNYA 20 (DUA PULUH) TAHUN SEJAK DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN KABUPATEN TANA TIDUNG DI ATAS MATERAI RP.6000, OLEH CALON PELAMAR DAN DIKETAHUI OLEH SUAMI/ISTRI/ORANG TUA/WALI;
8. FOTOKOPI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DAN KARTU KELUARGA (KK) YANG MASIH BERLAKU DAN DISAHKAN/DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG;
9. LEMBAR BUKTI/KARTU PENDAFTARAN SSCASN TAHUN 2019;

DEMIKIAN SURAT LAMARAN INI DIBUAT. ADAPUN SELURUH DATA DAN DOKUMEN YANG SAYA BERIKAN ADALAH BENAR. APABILA DIKEMUDIAN HARI DITEMUKAN DATA YANG TIDAK BENAR, MAKA SAYA MENERIMA KEPUTUSAN PANITIA MEMBATALKAN KEIKUTSERTAAN/KELULUSAN SAYA PADA SELEKSI CPNS PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN ANGGARAN 2019. ATAS PERHATIANNYA DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

HORMAT SAYA,

Materai RP.6000,-

ARYO WIGUNO, S.Kom

SURAT PERNYATAAN

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

N A M A :
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :
NOMOR KTP & KK :
PENDIDIKAN SESUAI YANG DILAMAR :
IPK :
JABATAN YANG DILAMAR :
JENIS KELAMIN :
A G A M A :
ALAMAT SESUAI KTP :
ALAMAT SEKARANG :
NOMOR HP/TELEPON :

DENGAN INI MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA, BAHWA SAYA :

1. MEMILIKI INTEGRITAS YANG TINGGI TERHADAP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA;
2. TIDAK PERNAH DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA ATAU KASUS NARKOBA;
3. TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI ATAU DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI CPNS/PNS/ANGGOTA TNI/POLRI/PEGAWAI BUMN/BUMD ATAU PEGAWAI SWASTA;
4. TIDAK BERKEDUDUKAN SEBAGAI CPNS/PNS/CALON ANGGOTA TNI/POLRI SERTA ANGGOTA TNI/POLRI/SISWA SEKOLAH IKATAN DINAS PEMERINTAH;
5. TIDAK MENJADI ANGGOTA ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK ATAU TERLIBAT POLITIK PRAKTIS;
6. MEMILIKI KUALIFIKASI PENDIDIKAN SESUAI DENGAN PERSYARATAN JABATAN YANG DILAMAR;
7. TIDAK MENUNTUT PENYESUAIAN IJAZAH YANG LEBIH TINGGI YANG DIPEROLEH SEBELUM DITERIMA SEBAGAI CPNS;
8. SEHAT JASMANI DAN ROHANI SESUAI DENGAN JABATAN YANG DILAMAR;
9. TIDAK MEMILIKI KETERGANTUNGAN TERHADAP NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN TERLARANG ATAU SEJENISNYA;
10. BERSEDIA DITEMPATKAN DI SELURUH WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ATAU NEGARA LAIN YANG DITENTUKAN OLEH PEMERINTAH;
11. BERKELAKUAN BAIK;
12. BERSEDIA MENERIMA SEGALA KEPUTUSAN TIM PENGADAAN CPNS PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN ANGGARAN 2019 DAN TIDAK AKAN MENGGANGGU GUGAT.

DEMIKIAN PERNYATAAN INI DIBUAT DENGAN SESUNGGUHNYA, APABILA DIKEMUDIAN HARI DITEMUKAN DATA YANG TIDAK BENAR, MAKA SAYA MENERIMA KEPUTUSAN PANITIA MEMBATALKAN KEIKUTSERTAAN/KELULUSAN SAYA PADA SELEKSI CPNS PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN ANGGARAN 2019 DAN SAYA BERSEDIA DITUNTUT DI MUKA PENGADILAN SERTA BERSEDIA MENERIMA SEGALA TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG.

TIDENG PALE,2019
YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

MATERAI RP. 6.000

.....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

N a m a :
Nomor Identitas KTP & KK :
Tempat / Tanggal Lahir :
Pendidikan sesuai yang dilamar :
IPK :
Jabatan yang Dilamar :
Jenis Kelamin :
Agama :
Alamat sesuai KTP :
Alamat sekarang :
Nomor Telepon/HP :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

- 1. Tidak akan mengajukan pindah tugas dengan alasan apapun sebelum memiliki masa kerja/mengabdikan sekurang-kurangnya 20 (Dua Puluh) tahun sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.**
- 2. Jika saya tetap mengajukan pindah, maka saya bersedia mengundurkan diri dan membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari CPNS/PNS Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa tekanan maupun paksaan dari manapun dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Mengetahui,
Suami/Istri/Orangtua/Wali

Tideng Pale, 2019
Yang membuat pernyataan,

.....

.....

KOP SURAT
RUMAH SAKIT / PUSKESMAS

SURAT KETERANGAN DISABILITAS

NOMOR :

Penandatanganan di bawah ini, Dokter Pemeriksa di Rumah Sakit / Puskesmas
..... menerangkan bahwa :

N a m a :
Tempat / Tgl Lahir :
Umur : Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *)
Alamat :
.....

Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan kemampuan fungsional bahwa yang
bersangkutan benar-benar sebagai Penyandang Disabilitas berupa :

1. Jenis / Ragam Disabilitas :

- a. Disabilitas Fisik
 - 1) Amputasi (Tangan / Kaki)*
 - 2) Lumpuh layuh atau kaku (Tangan / Kaki)*
 - 3) Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul)
 - 4) Cerebral Palsy (CP)
- b. Disabilitas Sensorik
 - 1) Netra
 - a) Buta Total
 - b) Persepsi Cahaya / Low Vision
 - 2) Rungu
 - 3) Wicara
- c. Disabilitas Intelektual
 - 1) Disabilitas Grahita
 - 2) Down Syndrome
- d. Disabilitas Mental
 - 1) Psikososial
(Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Ansietas, dan Gangguan Kepribadian) *
 - 2) Disabilitas perkembangan (Autis / Hiperaktif) *

2. Derajat Disabilitas :
3. Penyebab : Sejak Lahir / Kecelakaan dalam Pekerjaan / Kecelakaan
Lalu Lintas / Penyakit / Akibat Stroke / Akibat Kusta / Lain-
lain : *)
4. Alat Bantu yang Digunakan : Ada / Tidak *)
Berupa :

Surat keterangan ini untuk keperluan : **Persyaratan Melamar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019.**

Tempat, Tgl / Bln / Tahun

Dokter Pemeriksa,

Stempel

.....
NIP.
SIP.

Keterangan :

- *) Coret Yang Tidak Perlu/Sesuai dengan keadaan
- √ Pada kolom yang **Sesuai** dengan keadaan
- X Pada kolom yang **Tidak Sesuai** dengan keadaan

KOP SURAT
RUMAH SAKIT / PUSKESMAS

SURAT KETERANGAN DISABILITAS

NOMOR :

Yang bertandatangan di bawah ini Dokter Rumah Sakit / Puskesmas untuk keperluan persyaratan melamar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 dengan ini menerangkan bahwa :

- 1. Nama :
- 2. Tempat / Tgl Lahir / Umur :
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *)
- 4. Alamat :
.....
.....

5. Jenis / Ragam Disabilitas :

a. Fisik

- 1) Amputasi (Tangan / Kaki) *
- 2) Lumpuh Layuh atau Kaku (Tangan / Kaki) *
- 3) Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul)
- 4) Cerebral Palsy (CP)

b. Sensorik

- 1) Netra (Buta Total / Low Vision) *
- 2) Rungu
- 3) Wicara

c. Intelektual

- 1) Disabilitas Grahita
- 2) Down Syndrome

d. Mental

- 1) Psikososial (Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Ansietas, dan Gangguan Kepribadian) *
- 2) Disabilitas perkembangan (Autis / Hiperaktif) *

5. Derajat Kecacatan :

6. Diagnosa Penyebab Disabilitas : Sejak Lahir / Kecelakaan dalam Pekerjaan / Kecelakaan Lalu Lintas / Penyakit / Akibat Stroke / Akibat Kusta / Lain-lain : *)

7. Pengobatan yang Dibutuhkan atas Kecacatan yang Dialami : Tidak Ada
Ada
8. Alat Bantu yang digunakan : Tidak Ada
: Ada ;
9. Penyakit lain yang Membutuhkan Perawatan Khusus (seperti epilepsy) :
.....
.....
10. Activity Daily Living yang Bisa Dilakukan : Berdiri ; Bisa Tidak Bisa
Berjalan ; Bisa Tidak Bisa
Makan dan Minum ; Bisa Tidak Bisa
Mandi ; Bisa Tidak Bisa
Mencuci ; Bisa Tidak Bisa

Tempat, Tgl / Bln / Tahun

Dokter Pemeriksa,

Stempel

.....
NIP.
SIP.

Keterangan :

- *) Coret Yang Tidak Perlu/Sesuai dengan keadaan
- √ Pada kolom yang **Sesuai** dengan keadaan
- X Pada kolom yang **Tidak Sesuai** dengan keadaan

**PEJABAT YANG BERWENANG MENGESAHKAN
FOTO COPY IJAZAH/ STTB**

(Sesuai Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 Tanggal 17 Juni 2002)

NO	JENJANG PENDIDIKAN	YANG MENGELUARKAN DAN MENANDATANGANI IJAZAH ASLI	YANG MENGESAHKAN MELEGALISIR FOTO COPY
1	2	3	4
1	SD SLTP SMU SMK DAN YANG SETINGKAT	KEPALA SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN	KEPALA SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN KEPALA/KABAG/KABID / KASUBDIN ATAU YANG SETINGKAT DAN BERKOMPETEN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KANTOR DEPAG KAB / KOTA
2	UNIVERSITAS / INSTITUT	REKTOR DAN DEKAN	REKTOR / DEKAN / PEMBANTU DEKAN BIDANG AKADEMIK
3	SEKOLAH TINGGI	KETUA DAN PEMBANTU KETUA BIDANG AKADEMIK	KETUA / PEMBANTU KETUA BIDANG AKADEMIK
4	AKADEMI POLITEKNIK	DIREKTUR DAN P EMBANTU DIREKTUR B IDANG AKADEMIK	DIREKTUR/PEMBANTU DIREKTUR BIDANG AKADEMIK
5	PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM	PIMPINAN KOPERTIS	PEJABAT YANG BERWENANG DAN BERKOMPETEN PADA KOPERTIS
6	PERGURUAN TINGGI SWASTA AGAMA HINDU/BUDHA/ KRISTEN/KATHOLIK	KETUA/DIREKTUR URUSAN DAN DIREKTUR BIMAS URUSAN AGAMA YANG BERSANGKUTAN	KABID BIMAS AGAMA YANG BERSANGKUTAN PADA KANWIL AGAMA / KAKANDEP AGAMA KAB KOTA DAN DIREKTUR. SEKRETARIS DITJEN BIMAS YANG BERSANGKUTAN
7	SEKOLAH /AKADEMI/PERGURUAN TINGGI KEDINASAN	PIMPINAN SEKOLAH / AKADEMIK PERGURUAN TINGGI KEDINASAN YANG BERSANGKUTAN	KEPALA SEKOLAH/KETUA/ DIREKTUR AKADEMI ATAU PERGURUAN TINGGI YANG BERSANGKUTAN. KAPUSDIKLAT/KABID YANG BERKOMPETEN

- Untuk ijazah pendidikan dan luar negeri perlu dilampirkan surat penetapan pengakuan sederajat dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan setelah dinilai lebih dahulu oleh tim penilai ijazah luar negeri di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Menteri Agama / Direktur bagi Pendidikan Keagamaan.
- Bagi Ijazah Perguruan Tinnggi swasta yang belum terakreditasi sebelum berlakunya keputusan Mendiknas nomor 1x4/V/2001 tanggal 23 Nopember 2000
- Ijazah Perguruan Tinggi swasta yang mempunyai *civil effect* adalah ijazah dari Perguruan Tinggi Swasta yang telah mendapat izin penyelenggaraan dari Departemen Pendidikan Nasional.